

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN MALINO KABUPATEN GOWA

Hasnawati^{1*}, Isa Ansari², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine how the tourist attraction, amenities, accessibility, supporting facilities and institutional policies for tourism development in the Malino area, Gowa Regency. This study used descriptive qualitative research. The number of informants in this study was 8 people. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that aspects (1) tourism had been running, but the existence of Covid, the tourism development policy activities had not been maximized and were hampered by the allocation of funds. (2) The accessibility of each tourism development policy was less visible from the many roads that were potholes, narrow, but this was of course a special concern for local governments. (3) The amenities in tourism development policies were already running well. This could be seen in terms of the number of facilities provided by the government. (4) The supporting facilities for tourism development policies were good. This could be seen in terms of the infrastructure provided. (5) The tourism development policy institutions were already running well. This could be seen from the existence of an activity called Beautiful Malino, all people and business owners were involved

Keywords: *policy, tourism, development, malino*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana daya tarik wisata, amenitas, aksesibilitas, fasilitas pendukung dan kelembagaan kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan aspek (1) Daya tarik wisata sudah berjalan tetapi adanya Covid maka kegiatan kebijakan pengembangan pariwisata belum maksimal dan tersendak oleh pengalokasian Dana. (2) Aksesibilitas dalam kebijakan pengembangan pariwisata masing kurang di lihat dari masih banyak jalan yang berlubang, sempit namun hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. (3) amenitas dalam kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat di lihat dari segi banyaknya fasilitas yang di sediakan pemerintah. (4) fasilitas pendukung kebijakan pengembangan pariwisata sudah baik. Hal ini dapat di lihat dari segi prasarana yang di sediakan. (5)kelembagaan kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat di lihat dari adanya suatu kegiatan yang di namakan Beautiful Malino semua masyarakat dan pemilik usaha ikut terlibat.

Kata kunci: kebijakan, pengembangan, pariwisata, malino

* hasnawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah sebagai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan tujuan dan cita-cita, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai suatu sasaran. Carl J Federick sebagaimana di kutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan suatu rangkaian atau tindakan/kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.

Ruang lingkup studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lai-lain. Disamping itu dilihat dari hirarki kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional atau lokal seperti peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, peraturan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan keputusan

bupati/walikota, keputusan gubernur. Secara terminologi pengertian kebijakan public.

Dasar hukum yang berlaku di Indonesia tentang pengembangan wisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan yaitu Undang-Undang RI No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (pasal 6: pembangunan kepariwisataan di lakukan berdasarkan asas sebagaimana yang di maksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keunikan, kaenekaragaman dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, pasal 8:1) pembangunan kepariwisataan di lakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan

kepariwisataan).

Dengan otonomi daerah yang pada dasarnya bisa memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam percepatan proses pembangunan daerah kabupaten Gowa, Dinas kebudayaan dan pariwisata harus benar dalam menangkap pelimpahan tugas wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk menerima pendapatan asli daerah (PAD) dan memajukan masyarakat daerah. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian baik sebagai sumber pendapatan. Beberapa acuan normative yang telah di susun untuk menunjang pengembangan wisata daerah antara lain: (1) PP No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. (2)UU No 32 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah daerah.

Aspek lain yang tatkala penting dalam mendorong pengembangan wisata adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam kaitan ini kabupaten Gowa sebagai salah satu objek daya tarik wisata (ODTW) di Sulawesi selatan telah menetapkan di

dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2005-2010 dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2010-2025 sebagai dasar pembangunan kabupaten Gowa tentang bagaimana arah kebijakan pengembangan pariwisata sebagai berikut; (a) Peningkatan pendapatan anggota masyarakat melalui dengan kepariwisataan. Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemerintah pendapatan daerah. (c)Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat bagi kegiatan kepariwisataan. (d)Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembang nya usaha dan kegiatan kepariwisataan.

Sebagai salah satu dari ODTW (obyek daya tarik wisata) di provinsi Sulawesi selatan, kabupaten Gowa memiliki banyak potensi obyek wisata yang menarik di kembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni budaya dan wisata lainnya. Dalam kaitan kebijakan pengembangan potensi daya Tarik wisata yang di miliki, tidaklah terlepas dari perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini menghendaki adanya keterlibatan baik pihak swasta maupun pemerintah serta masyarakat di dalam rangka

mengakomodir kebutuhan sesuai peruntukan kondisi obyek wisata secara terintegrasi dalam sebuah perencanaan yang bermuara pada perwujudan kepentingan timbal balik dengan kata lain bahwa masing-masing pihak di butuhkan sesuai sarana dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata nasional dengan fokus pengembangan pada daya Tarik wisata (Bidarak, dkk 2017) maka pemerintah kabupaten Gowa tengah menaruh perhatian lebih kepada potensi daya Tarik wisata yang di milikinya. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang datang mengunjungi obyek wisata yang ada di kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pemerintah kabupaten Gowa dan Dinas pariwisata kabupaten Gowa telah membuat program untuk mengembangkan daya tarik wisatanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke kabupaten Gowa, baik itu wisatawan nusantara maupun mancanegara salah satu program pemerintah kabupaten Gowa yang tengah di jalankan yaitu *Beautiful Malino* yang merupakan program pemerintah dalam rangka memperkenalkan daya tarik wisata alam

yang ada di Malino. Program ini merupakan pengembangan pariwisata melalui kompetisi, karnaval dan pertunjukan musik modern serta berbagai kegiatan lainnya yang semuanya hanya di laksanakan di daerah Malino, kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Selatan kawasan Malino di kabupaten Gowa memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk di kembangkan, seperti wisata alam wisata sejarah wisata seni atau budaya dan masih banyak lagi wisata yang lain di kawasan Malino kabupaten Gowa. Pembangunan kepariwisataan hakikatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek wisata yang terwujud yaitu dalam bentuk, keragaman flora dan fauna, kekayaan alam yang indah kemajemukan tradisi seni budaya, dan peninggalan purbakala dengan latar belakang potensi wisata yang ada di Kawasan Malino Kabupaten Gowa, yang belum keseluruhan di kelola secara profesional, maka pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya kearah pengembangan pariwisata.

Malino merupakan Kawasan Wisata yang menjadi salah satu aset pariwisata Kabupaten Gowa yang perlu diperhatikan mengingat kawasan wisata yang memiliki banyak potensi daya tarik wisata serta merupakan kawasan yang strategis. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2009, Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dengan satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kawasan Wisata Malino sejak dahulu kala sudah dikenal sebagai tempat wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berada di Kota Makassar bahkan di Indonesia dan luar negeri. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. “Daya tarik wisata merupakan objek atau atraksi wisata apa saja yang dapat ditawarkan kepada wisatawan mereka

mau berkunjung ke suatu Negara atau DTW (Daerah Tujuan Wisata) tertentu” Yoeti (2008).

James E Aderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) memberikan pengertian bahwa kebijakan merupakan suatu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008:6) menyebutkan bahwa kebijakan publik yaitu “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah untuk memecahkan suatu masalah di masyarakat, baik secara langsung atau melalui beraneka ragam lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisiya tarik wisatawan menurut Yoeti (1995:90) adalah setiap orang yang datang dari suatu negara yang alasannya bukan menetap atau

berjaga secara teratur, dan di Negara dimana ia tinggal untuk sementara dan membelanjakan uang yang di dapat di lain tempat

Pengembangan Pariwisata mencakup komponen-komponen utama menurut Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd and Wanhill di kutip dari Sunaryo (2013) sebagai berikut; (1) objek dan daya Tarik wisata (*attraction*) yang mencakup: daya Tarik yang bias berbasis utama pada kekayaan alam, budaya maupun buatan */artificial*, seperti *event* atau sering di sebut sebagai minat khusus. (2) Akseibilitas (*accessibility*) yang mencakup dukungan system transfortasi yang meliputi: rute atau jalur transfortasi fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan modal transformasi lainnya. (3) Amenitas (*amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi rumah makan, retail, took cenderamata, penukaran uang, biro perjalanan pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. (4) Fasilitas pendukung (*Ancillary Services*) adalah adanya fasilitas pendukung yang di gunakan oleh wisatawan, seperti bank, rumah makan, tempat beribadah telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya. (5) Kelembagaan (*institutions*) adalah keberadaan dan

perang masing-masing unsur dalam mendukung tercapai kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat yang sebagai tuan rumah.

METODE PELITIAN

Waktu penelitian ini di lakukan selama 2 bulan dan penelitian ini di lakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Gowa dan Kantor kecamatan Tinggimoncong. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tipe penelitan ini yaitu penelitian deskriptif karena peneliti berusaha memberi gambaran yakni kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa pada skala lebih spesifik yakni pada tempat wisata Malino serta mengamati kondisi yang sebenarnya dari objek yang di teliti menurut objektivitas mengenai kondisinya.

Teknik pengumpulan data di lakukan melalui 3 cara yaitu: pertama teknik observasi, teknik wawancara, ketika teknik dookementasi sedangkan teknik pengabsahan data terdiri dari: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik analisis data sebagai berikut: (1) Reduksi data adalah komponen pertama pada analisis data yang memperpendek,

mempertegas, membuat fokus, tidak mengambil hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga simpulan peneliti dapat di lakukan. (2) Penyajian data data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah di pahami. (3) Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti dapat mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang di temui dengan mencatat peraturan-peraturan, sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggungjawabkan.

HASIL DAN PENELITIAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah sebagai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan tujuan dan cita-cita, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai suatu sasaran. Carl J Federick sebagaimana di kutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan suatu rangkaian atau tindakan/kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengembangan pariwisata adalah suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk ciri-ciri di luar pariwisata yang berhubungan secara langsung akan hubungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996; 99).

Kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa perlu adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengelola objek daya tarik wisata.

Objek Daya Tarik Wisata

Merupakan daya Tarik yang biasa berbasis utama pada kekayaan alam, budaya maupun buatan */artificial*, seperti *event* atau sering di sebut sebagai minat khusus dan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Undang-Undang No.10 Tahun 2009).

Objek daya Tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya Tarik yang tidak atau belum di kembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat di sebut daya Tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Objek daya Tarik wisata dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya Tarik wisata di suatu Daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit di kembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa dalam hal ini pemerintah daerah terus mengupayakan kebijakan pengembangan kawasan Malino secara maksimal meskipun masih tersendak oleh pengalokasian Dana. Pengelola dan masyarakat sekitar daya tarik wisata sebaiknya saling bekerja sama dalam perbaikan serta pengembangan daya tarik wisata.

Berkaitan dengan hasil obsevasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kebijakan pengembangan objek daya Tarik wisata Malino sudah berjalan tapi perlu adanya arah pengembangan dalam peningkatan kualitas perumusan program dan prioritas rencana pengembangan kepariwisataan secara

terpadu antar instansi yang terkait bukan hanya Dinas pariwisata kabupaten Gowa saja juga perlunya dukungan beberapa aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pengembangan kepariwisataan, dan kebijakan pengembangan objek daya Tarik wisata perlu diarahkan kepenetapan obyek wisata andalan dengan didukung mutu atas kondisi dan prasarana yang ada serta diikuti oleh pelestarian hidup.

Terdapat sebanyak sembilan daya tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun yang dikelola oleh swasta, yaitu terdiri dari daya tarik wisata alam sebanyak empat daya tarik wisata dan lima untuk daya tarik wisata buatan. Dengan demikian Kawasan Wisata Malino atau Kecamatan Tinggimoncong memiliki sembilan daya tarik wisata. Itupun belum terhitung dengan potensi-potensi daya tarik wisata baru lainnya yang belum dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa, serta pemerintah hanya berfokus ke satu tempat wisata yang dikembangkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek daya tarik wisata di kawasan Malino kabupaten Gowa masih perlu memperhatikan perencanaan dan objek pengolaan daya tarik wisata alam, sosial

budaya maupun objek wisata minat khusus yang harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Objek daya Tarik wisata Malino berdasarkan pada kebijakan pengembangan pariwisata sudah berjalan tetapi dengan adanya covid maka kegiatan kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan malino tertunda dan kebijakan pengembangan Kawasan Malino belum maksimal karena tersendak oleh pengalokasian Dana.

Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah semua kemudahan yang diberikan bukan hanya kepada calon wisatawan yang ingin berkunjung, akan tetapi juga kemudahan selama mereka melakukan perjalanan di daerah tujuan wisata (Oka A. Yoeti, 2008). Sedangkan menurut Lutfi Muta'ali (2015:180) "aksesibilitas adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan".

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa untuk aksesibilitas jalur transportasi di kawasan Malino kabupaten Gowa

sudah dapat dikatakan bagus dan sudah ada perbaikan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dan untuk masalah kemacetan terjadi pada hari-hari tertentu.

Berkaitan dengan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti bahwa untuk kondisi jalan menuju Kawasan Wisata Malino masih terbilang kurang bagus untuk kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan, masih banyak jalan yang berlubang, sempit dan pada musim hujan masih sering mengalami longsor. Namun hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah seperti yang jelaskan oleh Bapak Bupati Adnan Purichta Ichsan yang melakukan pembenahan pada jalan di Kabupaten Gowa terkhususnya jalan poros menuju Kawasan Wisata Malino.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang telah menggelontorkan dana Rp. 120 miliar untuk pelebaran jalan yang ada di Kabupaten Gowa. Dana Rp. 120 miliar itu masing-masing Rp. 70 miliar untuk pelebaran jalan provinsi di poros Malino dan Rp. 50 miliar lagi untuk pelebaran jalan nasional di poros Gowa-Takalar. Jalan poros Malino yang sebelumnya hanya dua bahu jalan kini

akan diperlebar menjadi empat bahu jalan, sehingga akses yang semula dua jam menuju kota bunga ini dapat dipercepat menjadi 45 menit melalui jalur alternatif di Pattalassang dan tak lebih satu jam melalui poros Bontomarannu-Parangloe.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa aksesibilitas di kawasan Malino kabupaten Gowa masih perlu perhatian dari pemerintah dalam hal ini infrastruktur jalan yang belum terlaksana dengan baik.

Amenitas

Amenitas adalah fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan pariwisata yang juga ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Definisi fasilitas juga dijelaskan oleh Kotler (2005) bahwa segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen atau wisatawan. Sedangkan menurut Mill (2000:30) fasilitas wisata merupakan pelayanan pendukung yang selalu siap dimanfaatkan oleh para wisatawan dan pelayanan tersebut menawarkan mutu dan harga yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan selama berada di kawasan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan informan bahwa untuk amenities di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah tersedia fasilitas pendukung namun dari segi penjualan cinderamata itu belum ada

Berkaitan dengan hasil observasi peneliti bahwa dari segi amenities kebijakan penembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah baik di lihat dari segi banyaknya fasilitas penunjang yang disediakan pemerintah daerah di kawasan Malino, fasilitas ini digunakan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung dan wisatawan yang berkunjung. Salah satu fasilitas yang paling sering dicari oleh pengunjung dan wisatawan yaitu fasilitas ibadah tidak hanya fasilitas ibadah yang tersedia namun terdapat juga fasilitas keamanan. Bagi wisatawan yang menginap beberapa hari di Kawasan Wisata Malino dapat memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan.

Terdapat juga sarana Pemasaran/Pasar yang dapat dimanfaatkan warga setempat dalam pemenuhan kebutuhan serta dijadikan juga sebagai pusat oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung, wisatawan yang berkunjung dapat membeli oleh-oleh seperti makanan khas Malino. Serta berbagai macam fasilitas rumah

makan, warung makan dan Cafe. Fasilitas lainnya seperti fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Malino, kantor Bank BRI cabang Malino dan ATM BRI, kantor Bank Mandiri Cabang Malino dan ATM Bank Mandiri, toko serba Malino Mart Serta tersedia juga satu buah SPBU.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa amenities di kawasan Malino kabupaten Gowa dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah bisa di nyatakan baik dari segi fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah setempat.

Fasilitas Pendukung

Setiap usaha pariwisata yang ada, membutuhkan berbagai sarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan para wisatawan, yaitu salah satunya adalah aksesibilitas. Karena tanpa adanya sarana yang memadai, usaha pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya tanpa kegiatan pariwisata usaha fasilitas pendukung tidak akan berjalan secara optimal. Fasilitas pendukung wisata dapat berupa tempat dimana pengunjung dapat beristirahat, menginap, mandi, makan dan minum, serta menikmati jasa layanan misalnya sarana hiburan yang disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa untuk fasilitas pendukung di kawasan Malino kabupaten Gowa cukup bagus dari segi sarana dan prasarananya. Adapun seperti penginapan pada dasarnya milik masyarakat setempat namun tetap dimonitoring dan dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

Berkaitan dengan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti bahwa fasilitas pendukung di kawasan Malino dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah tersedia dapat di lihat dari keseluruhan fasilitas pendukung terletak di kecamatan Tinggimoncong.

Kawasan Wisata Malino tersedia sarana fasilitas pendukung bagi wisatawan yang berkunjung, yang mana terdapat empat jenis akomodasi diantaranya Hotel, Villa, Penginapan, Pondok wisata/*Homestay*. Terdapat 6 hotel yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Anauang, Jalan Gunung Lompobattang dan Jalan Endang, terdapat 10 villa dengan rata-rata berdada di Jalan Karaeng Pado dan Jalan Sultan Hasanuddin, juga terdapat 28 penginapan dengan rata-rata berada di Jalan Karaeng Pado, Jalan Endang,

Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Anuang serta lainnya berada di Jalan Batulapisi dan Bulutana dan yang terakhir terdapat 18 pondok wisata/*homestay* dengan rata-rata berada di Jalan Karaeng Pado dan selebihnya berada di Jalan Endang dan Jalan Pattene. Dengan demikian Kawasan Wisata memiliki 62 buah fasilitas pendukung.

Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa fasilitas pendukung dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah tersedia baik dari sarana dan prasarana dan pada dasarnya penginapan milik masyarakat setempat namun tetap dimonitoring dan dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

Kelembagaan

Kelembagaan (*institutions*) adalah keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung tercapai kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat yang sebagai tuan rumah. Kelembagaan yaitu terkait peran institusi pemerintah dan masyarakat setempat dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa dalam mengembangkan wisata di kabupaten

Malino yang terlibat bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Program yang biasa dilakukan adalah Beautiful Malino dimana semua pelaku baik segi eksekutif budayanya sampai pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan rumah makan juga terlibat. Dari segi sosialisasinya sudah baik tapi yang kurang realisasinya di lapangan.

Berkaitan dengan hasil observasi peneliti bahwa peran masing-masing dalam mendukung tercapainya kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah baik di lihat dari adanya suatu kegiatan semua pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Malino ikut terlibat salah satu contoh adalah *Beautiful Malino* yang biasa di laksanakan pada bulan Juli tapi terkait dengan adanya covid maka kegiatan itu tidak di laksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dari pemerintah mengatakan program beautiful Malino harus di laksanakan 3 kali sehingga biasa di jadikan kalender nasional masuk ke dalam kalender kepariwisataan itu di nilai dari kunjungan yang selalu meningkat jadi di saat itu pelaku usaha di kawasan Malino ikut terlibat dalam pengembangan kebijakan pariwisata di kawasan Malino.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kelembagaan dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa dalam hal ini pemerintah dan masyarakat kawasan Malino masing-masing ikut terlibat dalam suatu program yang di adakan seperti *Beautiful Malino*.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang dilakukan di lapangan tentang kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Objek daya Tarik wisata dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah berjalan tetapi adanya covid maka kegiatan kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino belum maksimal dan tersandak oleh pengalokasian dana.

Aksebilitas dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino Kabupaten Gowa bahwa untuk kondisi jalan menuju Kawasan Wisata Malino masih terbilang kurang bagus untuk kawasan wisata yang sering dikunjungi wisatawan, masih banyak jalan yang berlubang, sempit dan pada musim hujan masih sering mengalami

longsor. Namun hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah

Amenitas dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah baik di lihat dari segi banyaknya fasilitas penunjang yang disediakan pemerintah daerah di kawasan Malino, fasilitas ini digunakan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung dan wisatawan yang berkunjung.

Fasilitas pendukung dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa cukup bagus dari segi sarana dan prasarananya.

Kelembagaan dalam kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa bahwa perang masing-masing dalam mendukung tercapainya kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Malino kabupaten Gowa sudah baik di liat dari adanya suatu kegiatan semua pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Malino ikut terlibat salah satu contoh adalah *Beautiful Malino* yang biasa di laksanakan pada bulan Juli tapi terkait dengan adanya covid maka kegiatan itu tidak di laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2003). *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pengembang Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharno. (2010). *Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Diperoleh Dari 4636_1364-UU tentang kepariwisataan net1.
- Tangkilisan, H, N.S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Likman Offset.
- Wisnu, S. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No 10*
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti, O, A. (1995). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Angkasa